

## Polres Baubau Tahan Dua Tersangka Kasus Pencurian Emas, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah



Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Baubau resmi menahan dua tersangka berinisial AA dan AL dalam kasus pencurian emas. Kasus pencurian tersebut ditaksir miliaran rupiah.

Salah Satu tersangka inisial AL diduga berperan sebagai penadah hasil pencurian emas. Polres Baubau saat melakukan penahanan kedua tersangka setelah penyidik men-

gantongi sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang dinilai cukup untuk memperkuat dugaan keterlibatan keduanya dalam perkara tersebut.

Kanit I Satreskrim Polres Baubau, Ipda Muhammad Fatih Zhafran, S.Tr.K., mengatakan, ke Dua tersangka ditahan sejak 5 Juni 2026. Selanjutnya, pada 8 Juni 2026, keduanya dipindahkan dari ruang tahanan Pol-

Lanjut ke Hal: 7

## Buton Selatan Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk 10 OPD Strategis, Pendaftar Tembus 59 Orang, Minus Dukcapil dan Pol PP



Kepala BPKPSDM Busel Ahmad Jamaluddin

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencatat tingginya minat aparat sipil negara (ASN) dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Hingga menjelang penutupan pendaftaran pada 19 Juni 2026 pukul 21.08 WITA, jumlah pelamar yang mendaftar

mencapai 59 orang untuk memperebutkan 10 jabatan strategis setingkat eselon II.b yang masih lowong di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton Selatan, Ahmad Jamaluddin, mengatakan

Lanjut ke Hal: 7

## BUPATI H MUH ADIOS LAKUKAN GROUNDBREAKING KANTOR BUPATI BUTON SELATAN

DILAHAN 12 HEKTAR, PROYEK BERNILAI Rp49,7 MILIAR DITARGET SELESAI 2 MARET 2028



### PELETAKAN BATU PERTAMA

Bupati Buton Selatan H. Muh Adios, S.Sos., M.B.A. bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. H. Hugua, M.Ling., resmi melakukan groundbreaking pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Jumat (19/6/2026).

### LOKASI & LAHAN

- Berlokasi di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga
- Dibangun di atas lahan seluas 12 HEKTAR

### NILAI & SUMBER DANA

- Nilai Proyek Rp49.728.000.000
- Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- Tahun Anggaran 2026-2028

### WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pekerjaan 630 HARI KALENDER
- Mulai 12 Juni 2026
- Ditargetkan selesai 2 MARET 2028

Pembangunan Kantor Bupati ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung semata, melainkan simbol kemajuan, pemersatu, dan semangat baru bagi tata kelola pemerintahan daerah.

H. MUH ADIOS, S.Sos., M.B.A.  
BUPATI BUTON SELATAN



### DIHADIRI OLEH

- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
- Wali Kota & Wakil Wali Kota Baubau
- Anggota DPD RI Waode Rabia Aladawia, S.E., M.B.A.
- Ketua DPRD Buton Selatan beserta anggota
- Dandim 1413 Buton, Kapolres Buton, Kapolres Baubau
- Kejaksaan Negeri Pasarwajo
- Pengadilan Negeri Pasarwajo
- Para Kepala OPD, Camat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan tamu undangan lainnya

### DATA PROYEK

- Skema : Multi Years
- Nomor Kontrak : 01/Kontrak-KTR Bupati/PUPR/VI/2026
- Nilai Kontrak : Rp49.728.000.000
- Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
- Konsultan Pengawas : PT. Arihta Teknik Persada
- Pelaksana Konstruksi (KSO BPK-MKI JO):
  - PT. Bumi Permata Kendari Cabang Baubau
  - PT. Murni Konstruksi Indonesia



SEMANGAT BARU PELAYANAN PUBLIK LEBIH BAJU

KOMITMEN UNTUK BUTON SELATAN YANG MAJU

## Anggota DPRD Baubau H masri Minta Disperindag Baubau Ungkap Penyebab Lonjakan Harga Minyak Goreng dan Naiknya Sejumlah Sembako

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Anggota DPRD Baubau Drs H Masri MPd meminta Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera menungkap penyebab kenaikan harga minyak goreng dan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terjadi dalam sekitar tiga pekan terakhir. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Masri menegaskan DPRD akan ikut mengawasi perkembangan harga di lapangan. Bersama Komisi II DPRD Baubau,



Anggota DPRD Baubau H Masri MPd

pihaknya berencana melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan stok serta memonitor harga minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai, dan beras premium yang belakangan dikeluhkan warga.

"Nanti bersama Komisi II DPRD kita akan turun ke pasar-pasar untuk terus memantau harga min-

yak goreng dan stoknya, bawang merah, gula pasir, cabai, dan beras premium," ujar Masri.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat dan memicu inflasi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah diminta segera melakukan identifikasi terhadap penyebab utama kenaikan harga agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. "Jangan dibiarkan terlalu lama kondisi seperti ini. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah," kata Masri.

Menurut dia, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap

Lanjut ke Hal: 7

## Pengurus BKMT Kadatua-Batauga Dilantik, Ny Siti Norma Adios akan Perkuat Syiar Islam di Daerah



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Buton Selatan resmi mengukuhkan jajaran Pengurus BKMT Kecamatan Kadatua dan Kecamatan Batauga dalam rangka memperkuat syiar Islam serta meningkatkan pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat. Pelantikan yang dip-

impin Ketua BKMT Kabupaten Buton Selatan, Hj. Siti Norma Adios, berlangsung secara maraton pada Sabtu (6/6/2026) di dua lokasi berbeda.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Bupati H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., hadir bersama Sekretaris Daerah,

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasitimes

BUTON SELATAN, BP Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memulai pembangunan Kantor Bupati yang baru melalui prosesi peletakan batu pertama di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Jumat (19/6/2026). Proyek bernilai Rp49,728 miliar tersebut ditargetkan selesai pada 2 Maret 2028 dan diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Pembangunan gedung tersebut menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multi years) dengan masa pelaksanaan selama 630 hari kalender. Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dimulai pada 12 Juni 2026 melalui Nomor Kontrak 01/Kontrak-KTR Bupati/PUPR/VI/2026 dan dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Prosesi groundbreaking dipimpin

Lanjut ke Hal: 7

## Bupati H Muh Adios Lakukan Groundbreaking Kantor Bupati Buton Selatan Dilahan 12 Hektar, Proyek Bernilai Rp49,7 Miliar Ditarget Selesai 2 Maret 2028

langsung oleh Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. H. Hugua, M.Ling. Kehadiran keduanya menandai dimulainya salah satu proyek infrastruktur pemerintahan terbesar di Kabupaten Buton Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa pembangunan kantor baru bukan hanya menghadirkan gedung administrasi, tetapi juga menjadi simbol transformasi birokrasi di daerah.

"Pembangunan Kantor Bupati ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung semata, melainkan simbol kemajuan, pemersatu, dan semangat baru bagi tata kelola pemerintahan daerah," ujar Muhammad Adios.

Ia menjelaskan, kantor tersebut nantinya dirancang sebagai pusat pelayanan masyarakat, rumah aspirasi, sekaligus pusat koordinasi pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan nyaman sehingga mampu mendukung peningkatan efektivitas birokrasi.

Menurut Bupati,

lokasi pembangunan berada di atas lahan sekitar 12 hektare di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Pembiayaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembiayaan Kantor Bupati dengan Pelaksanaan Tahun Jamak untuk periode anggaran 2026-2028.

"Gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik," kata Bupati.

Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek pelaksanaan proyek. Kepada dinas teknis dan kontraktor, Bupati meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan secara profesional, transparan, tepat waktu, serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

"Kami berharap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi teknis agar menghasilkan bangunan yang kokoh dan berumur panjang," tegasnya.

Bupati turut mengajak seluruh masyarakat serta pemangku ke-

penting untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, partisipasi publik dan pengawasan bersama akan menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Acara peletakan batu pertama dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, antara lain Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Anggota DPD RI Waode Rabbia Aladawia, Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan beserta anggota, jajaran TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Pasarwajo, organisasi perangkat daerah, para camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Berdasarkan informasi proyek, pengawasan pembangunan dilakukan oleh PT Arhiha Teknik Persada, sedangkan pelaksanaan konstruksi merupakan kerja sama operasi (KSO) BPK-MKI JO yang terdiri atas PT Bumi Permata Kendari Cabang Baubau dan PT Murni Konstruksi Indonesia.

Secara historis, pembangunan pusat pemerintahan baru merupa-

kan tahapan yang lazim dilakukan oleh daerah otonom untuk memperkuat fungsi administrasi dan pelayanan publik. Di Indonesia, berbagai daerah hasil pemekaran dalam dua dekade terakhir juga membangun kompleks perkantoran pemerintahan secara bertahap sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks internasional, pembangunan gedung pemerintahan modern juga menjadi tren di banyak negara sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Konsep tersebut menitikberatkan pada penyediaan fasilitas yang mendukung koordinasi antarlembaga, akses masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan target penyelesaian pada awal 2028, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kantor baru tersebut dapat menjadi pusat administrasi yang representatif sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (\*)

## Polres Baubau Tahan Dua Tersangka Kasus Pencurian Emas, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

Polres Baubau ke Lembaga Masyarakat (Lapas) Baubau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Jadi, perkara pencurian emas kami telah menahan dua tersangka, yakni AA dan AL. Penahanan dilakukan pada 5 Juni 2026 dan selanjutnya pada 8 Juni keduanya dipindahkan ke Lapas Baubau," tutur Fatih pada awak media, Sabtu (13/6/2026).

Fatih menambahkan, keterangan saksi yang diperiksa juga mengarah pada tersangka saat peristiwa pencurian terjadi. Itu yang menjadi dasar kuat dalam proses penyidikan.

"Jadi, penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan tersangka AA dalam tindak pidana pencurian. Dimana salah satu bukti utama berupa barang hasil curian yang ditemukan di rumah tersangka," tambahnya.

Sementara itu, tersangka AL dijerat dalam perkara penadahan. Berdasarkan hasil penyidikan, AL diduga menerima sebagian emas hasil pencurian dari AA sebelum membawanya ke Makassar untuk dijual. Penyidik menduga transaksi penjualan dilakukan selama sekitar satu pekan saat tersangka berada di luar daerah.

"Dari hasil penyidikan, tersangka AL menerima sebagian barang hasil curian dari AA. Barang tersebut kemudian dibawa ke Makassar dan dijual. Peran inilah yang menjadi dasar penetapan tersangka penadahan terhadap AL," ungkapnya.

Lebih lanjut, perkara tersebut telah

memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan pemeriksaan saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Baubau.

Fatih mengungkapkan pihaknya baru saja kembali dari Kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat berkas perkara. Dan saat ini penyidik masih melengkapi alat bukti dan pemeriksaan saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Baubau.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Baubau. Rencananya berkas perkara akan kami serahkan dalam waktu dekat setelah seluruh pemeriksaan saksi yang diperlukan dinyatakan lengkap," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka AA disangkakan melanggar Pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara antara tujuh hingga 12 tahun. Sementara tersangka AL dijerat Pasal 591 KUHP tentang penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas milik warga Baubau yang dilaporkan kepada Polres Baubau pada akhir tahun 2025. Perkara tersebut sempat menjadi perhatian publik karena nilai kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. (\*)

## Anggota DPRD Baubau H masri Minta Disperindag Baubau Ungkap Penyebab Lonjakan Harga Minyak Goreng dan Naiknya Sejumlah Sembako

kemungkinan adanya gangguan distribusi, hambatan transportasi, hingga dugaan penimbunan oleh pihak-pihak tertentu. Penjelasan yang transparan kepada publik dinilai penting agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Apakah ada penimbunan oleh oknum ter-

tentu, apakah kelangkaan ini terjadi karena masalah transportasi yang tidak lancar atau ada persoalan lain misalnya imbas Kenaikan Rupiah terhadap Dolar ataukah da hal lain. Ini harus dideteksi dan dijelaskan kepada publik," tegasnya.

Masri mengatakan DPRD akan terus memantau perkembangan

situasi tersebut sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia berharap hasil pemantauan di pasar dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis guna memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar sehingga tidak semakin membebani masyarakat Kota Baubau. (\*)

## Pengurus BKMT Kadatua-Batauga Dilantik, Ny Siti Norma Adios akan Perkuat Syiar Islam di Daerah

Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Kadatua, Camat Batauga, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton Selatan beserta pengurus, serta sejumlah tokoh agama yang menyaksikan prosesi pelantikan.

Rangkaian acara dimulai pada pagi hari di Gedung Serbaguna SMPN 1 Kadatua dan dilanjutkan pada sore hari di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga. Model pelantikan secara estafet tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kepengurusan tingkat kecamatan dapat dikukuhkan dalam momentum yang sama.

Dalam sambutannya, Hj. Siti Norma Adios menegaskan bahwa keberadaan majelis taklim memiliki peran penting dalam pembangunan karakter masyarakat. "Majelis taklim bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan pilar strategis dalam membangun karakter dan mentalitas daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi masyarakat di Kadatua dan Batauga yang dinilai mampu menjaga nilai-nilai religius sekaligus melestarikan budaya gotong royong. "Potensi inilah yang harus terus kita pupuk dan perkuat melalui kegiatan keagamaan yang membawa kesejukan serta mempererat persatuan di tengah masyarakat," kata Hj. Siti Norma Adios. Menurutnya, para pengurus yang

baru dilantik mengemban tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlakul karimah. Di akhir sambutan, ia berpesan, "Selamat mengemban amanah. Jalankan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan," serta menambahkan, "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita."

Secara historis, BKMT merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia sebagai wadah pembinaan umat melalui kegiatan majelis taklim, pendidikan agama, dan pemberdayaan sosial. Keberadaannya telah menjadi salah satu mitra pemerintah dalam memperkuat pendidikan keagamaan nonformal serta membangun kohesi sosial di tingkat komunitas.

Pelantikan pengurus BKMT Kecamatan Kadatua dan Batauga diharapkan menjadi momentum untuk memperluas jangkauan dakwah yang inklusif dan memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Kabupaten Buton Selatan. (\*)

## Buton Selatan Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk 10 OPD Strategis, Pendaftar Tembus 59 Orang, Minus Dukcapil dan Pol PP

pendaftar menunjukkan besarnya antusiasme ASN untuk berkompetisi secara terbuka dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi. "Menjelang penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang telah memasukkan berkas mencapai 59 orang," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/06/2026).

Seleksi tersebut dilaksanakan untuk mengisi sejumlah posisi penting, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala BKPSDM Buton Selatan.

Menurut Ahmad Jamaluddin, seluruh tahapan seleksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif. "Pelaksanaan seleksi ini juga telah memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara melalui surat resmi yang diterbitkan pada 5 Mei 2026," katanya.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform ASN Karier BKN sejak 4 hingga 18 Juni 2026. Selain mengunggah dokumen secara elektronik, peserta diwajibkan menyerahkan berkas fisik kepada sekretariat panitia seleksi. Tahapan berikutnya meliputi seleksi administrasi dan rekam jejak, uji kompetensi melalui assessment center, penulisan makalah, presentasi, serta wawancara. Hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada 2 Juli 2026.

Panitia menetapkan sejumlah syarat bagi pelamar, antara lain berstatus PNS, memiliki pendidikan minimal sarjana atau diploma IV, berpangkat sekurang-kurangnya Pembina IV/a, serta pernah atau sedang menduduki jabatan administrator

atau jabatan fungsional ahli madya paling sedikit dua tahun. Selain itu, pelamar wajib memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam dua tahun terakhir, serta berusia maksimal 56 tahun saat pelantikan.

Terkait tidak dibukanya seleksi untuk jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas, Ahmad Jamaluddin menjelaskan bahwa posisi Kepala Satpol PP akan diisi melalui mekanisme evaluasi kinerja pejabat JPT yang ada. "Jabatan Kepala Satpol PP akan diisi oleh pejabat JPT lain yang telah mengikuti evaluasi kinerja," ujarnya. Ia menambahkan, "Usulan seleksi terbuka lebih dahulu diajukan ke BKN sebelum terbitnya keputusan pemberhentian pejabat definitif di Dukcapil."

Secara historis, kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi terbuka mulai

diterapkan secara luas di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut mendorong sistem merit dalam birokrasi guna memastikan pengisian jabatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Praktik serupa juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, dan Kanada melalui sistem rekrutmen pejabat publik yang kompetitif dan transparan untuk memperkuat profesionalisme birokrasi.

Melalui seleksi terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap memperoleh aparatur terbaik yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. "Kami berharap seleksi ini menghasilkan pemimpin perangkat daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan," kata Ahmad Jamaluddin. (\*)

## Usai Bertemu DPR, Mahasiswa Ingatkan Dampak Krisis Kebutuhan Pokok



Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP— Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Desakan tersebut disampaikan setelah perwakilan mahasiswa menggelar dialog tertutup dengan pimpinan DPR RI, Sabtu.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam, mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WIB, menjadi ruang penyampaian aspirasi mahasiswa kepada DPR dan pemerintah. Dalam forum tersebut, sejumlah tuntutan yang selama ini disuarakan dalam aksi massa dibahas secara langsung.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan lebagganya telah menerima aspirasi mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah melalui komunikasi dengan sejumlah pejabat terkait. Menurut dia, dialog tersebut berlangsung konstruktif dan akan ditindaklanjuti melalui komunikasi yang lebih intensif.

"Kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan kare-

na memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga ke depan kami akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa," kata Dasco kepada wartawan usai pertemuan.

Dari pihak mahasiswa, Dhenni Ribowo menegaskan bahwa persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia menilai pemerintah harus segera merespons berbagai keluhan yang muncul di tengah masyarakat terkait akses terhadap energi dan kebutuhan pokok.

Menurut Dhenni, salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah kelangkaan BBM subsidi yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah.

"Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi," ujarnya.

Ia menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada DPR maupun pemerintah. Pengawasan dilakukan agar berbagai komitmen yang muncul dalam dialog tersebut tidak berhenti pada tataran wacana.

"Isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pas-

ti pemerintah yang kena," kata Dhenni.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Selain itu, hadir pula perwakilan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) yang turut menyampaikan aspirasi dalam forum tersebut.

Secara historis, isu harga pangan dan ketersediaan energi kerap menjadi pemicu gelombang protes sosial di berbagai negara. Di Indonesia, kenaikan harga bahan pokok maupun kebijakan energi beberapa kali memunculkan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, termasuk pada periode reformasi 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan melonjaknya harga kebutuhan hidup.

Dalam konteks nasional, persoalan distribusi BBM subsidi juga telah berulang kali menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan penataan subsidi energi dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan beban anggaran negara. Namun, tantangan distribusi di sejumlah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan publik.

Fenomena serupa juga terjadi di

berbagai negara. Dalam satu dekade terakhir, sejumlah negara di Amerika Latin, Timur Tengah, hingga Eropa pernah menghadapi aksi protes akibat kenaikan harga energi dan biaya hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan akses terhadap energi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Pengamat kebijakan publik menilai dialog antara mahasiswa dan DPR merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan aspirasi masyarakat tersampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik diharapkan dapat memperoleh solusi yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Mahasiswa menegaskan bahwa fokus utama mereka bukan sekadar men-tah, melainkan memastikan pemerintah hadir dalam menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Karena itu, hasil pertemuan dengan DPR akan terus dipantau sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. (\*)

## Istana Tegaskan Pertemuan Didit Prabowo dan Jokowi di Solo Murni Silaturahmi



Didit putra Prabowo temui Jokowi di Solo.

### Laporan: Radit

JAKARTA, BP— Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pertemuan antara putra Presiden RI Prabowo Subianto, Rago Hediprasetyo atau Didit Prabowo, dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, tidak berkaitan dengan agenda politik maupun penyampaian pesan khusus dari Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari silaturahmi yang berlangsung setelah Didit menghadiri peringatan Malam 1 Suro di Kota Solo.

Penjelasan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6).

Menurut Prasetyo, keberadaan Didit di Solo bertepatan dengan pelaksanaan tradisi Malam 1 Suro yang setiap tahun menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Jawa, khususnya di kawasan Surakarta.

"Silaturahmi lah, kebetulan karena beliau sedang berada di Solo karena 1 Muharam kemarin, silaturahmi," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah beredarnya informasi mengenai pertemuan tertutup antara Didit dan Jokowi di kediaman pribadi mantan kepala negara tersebut.

Prasetyo juga membantah adanya pesan tertentu yang dititipkan Presiden Prabowo kepada Jokowi melalui putranya. Saat ditanya mengenai kemungkinan itu, ia menjawab singkat, "Ndak ada."

Berdasarkan informasi yang dihimpun,

Didit tiba di kediaman Jokowi di Solo sekitar pukul 11.02 WIB pada Kamis (18/6). Ia datang menggunakan kendaraan berpelat nomor AB 1553 UH dan langsung memasuki rumah tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.

Selama berada di dalam rumah, Didit diketahui membawa sejumlah buku. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 30 menit tanpa kehadiran media maupun pihak lain yang dapat mengakses isi pembicaraan tersebut.

Sekitar pukul 11.40 WIB, Didit keluar dari kediaman Jokowi dan langsung menuju kendaraannya. Sebelum meninggalkan lokasi, ia berpamitan serta menyalami Jokowi yang turut mengantar hingga ke gerbang rumah.

Kepada wartawan, Didit memilih tidak mengungkapkan materi pembicaraan yang berlangsung selama pertemuan. Ia hanya menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah Jokowi dilakukan setelah mengikuti rangkaian kegiatan Malam 1 Suro di kawasan Mangkunegaran, Solo.

"Mampir, habis satu Suro," ujar Didit singkat dari dalam mobil sebelum meninggalkan lokasi.

Sikap serupa juga ditunjukkan Jokowi. Mantan Presiden RI tersebut tidak bersedia menjelaskan isi pembicaraan yang berlangsung dengan Didit. Jokowi hanya terlihat mengantar tamunya hingga ke gerbang dan melambakan tangan saat kendaraan Didit meninggalkan halaman rumah.

Pertemuan antara tokoh-tokoh nasional dan mantan pemimpin negara sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi politik Indonesia. Dalam berbagai periode pemerintahan, hubungan komunikasi antara presiden yang

sedang menjabat dan mantan presiden kerap berlangsung untuk menjaga kesinambungan kebijakan, stabilitas politik, serta komunikasi kebangsaan.

Secara historis, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, juga beberapa kali melakukan komunikasi dengan Jokowi setelah masa jabatannya berakhir. Demikian pula hubungan antara para mantan pemimpin nasional yang tetap menjalin interaksi dalam berbagai momentum kenegaraan maupun kegiatan sosial.

Dalam konteks internasional, tradisi serupa juga terjadi di berbagai negara demokrasi. Di Amerika Serikat, misalnya, mantan presiden kerap menerima kunjungan pejabat negara, anggota keluarga pemimpin, maupun tokoh politik untuk membahas isu kebangsaan atau sekadar menjalin hubungan personal. Praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari budaya politik yang menjaga kesinambungan komunikasi antarelit negara.

Sementara itu, peringatan Malam 1 Suro yang menjadi latar kunjungan Didit merupakan tradisi budaya yang memiliki akar sejarah panjang di Jawa. Tradisi tersebut merupakan perpaduan antara penanggalan Islam dan budaya Jawa yang telah berlangsung sejak era Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17 dan masih diperingati hingga saat ini, terutama di Solo dan Yogyakarta.

Meski tidak ada informasi resmi mengenai isi pembicaraan antara Didit dan Jokowi, Istana memastikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Penjelasan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait kemungkinan adanya agenda politik tertentu di balik kunjungan tersebut. (\*)

## MTQ XXXI Sultra di Konawe, Kendari Fokus Tingkatkan Kualitas Peserta



Pemerintah Kota Kendari memantapkan persiapan kafilah yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe.

### Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari memantapkan persiapan kafilah yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Kendari, Sapri, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan peserta yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah pada ajang keagamaan terbesar di tingkat provinsi tersebut.

Rapat persiapan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Jumat (19/6/2026), dengan melibatkan peserta MTQ, pelatih, pendamping, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam pembinaan kafilah.

Selain membahas kesiapan peserta, pertemuan tersebut juga mengulas berbagai kebutuhan teknis yang berkaitan dengan keberangkatan dan pelaksanaan lomba, mulai dari administrasi, akomodasi, hingga koordinasi selama kegiatan berlangsung di Konawe.

Sapri menegaskan

kan bahwa kesiapan mental, kemampuan teknis, dan kesehatan peserta menjadi faktor penting dalam menghadapi kompetisi yang mempertemukan kafilah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

"Para peserta agar terus meningkatkan kemampuan, disiplin dalam mengikuti pembinaan, serta menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan lomba," ujar Sapri dalam arahannya kepada para peserta.

Menurut dia, pembinaan yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penampilan peserta pada setiap cabang yang diikuti.

"Dengan persiapan yang optimal, kami berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa prestasi bagi Kota Kendari," katanya.

Dalam rapat tersebut, peserta juga diberi kesempatan menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi selama masa persiapan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anggota kafilah mem-

peroleh dukungan yang memadai.

Langkah konsolidasi yang dilakukan Pemkot Kendari dinilai penting karena MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Secara historis, MTQ Nasional pertama kali diselenggarakan di Makassar pada 1968 sebagai upaya memperkuat syiar Islam dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an. Sejak saat itu, MTQ berkembang menjadi agenda rutin yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai cabang perlombaan yang terus bertambah.

Di tingkat internasional, kompetisi tilawah Al-Qur'an juga telah lama menjadi tradisi di berbagai negara Muslim. Malaysia, misalnya, menyelenggarakan International Quran Recital and Memorisation Assembly sejak awal 1960-an dan menjadi salah satu ajang tilawah internasional paling bergengsi di dunia Islam.

Indonesia sendiri kerap menorehkan prestasi dalam kompetisi

Al-Qur'an tingkat dunia. Sejumlah qari dan qariah Indonesia berhasil meraih juara pada berbagai ajang internasional, menunjukkan kualitas pembinaan Al-Qur'an yang terus berkembang di Tanah Air.

Karena itu, MTQ tingkat daerah dan provinsi dipandang sebagai bagian penting dalam proses pembinaan berjenjang untuk melahirkan generasi Qurani yang mampu berprestasi sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Kami ingin keikutsertaan ini tidak sekadar mengikuti perlombaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat syiar Islam dan membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia," kata Sapri.

Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh rangkaian persiapan yang dilakukan dapat memberikan hasil optimal saat pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Dengan dukungan pelatih, pendamping, dan pemerintah daerah, kafilah Kendari ditargetkan mampu tampil kompetitif dan meraih prestasi membanggakan bagi daerah. (\*)

## Menuju Jamnas XII 2026, Kontingen Pramuka Kendari Matangkan Kesiapan Total



### Laporan: Mashuri

KENDARI, BP- Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari mulai memantapkan seluruh aspek persiapan kontingen yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang mempertemukan unsur pengurus Pramuka, pihak sekolah, serta orang tua peserta di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari, Sabtu (20/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan kesiapan peserta, dukungan logistik, administrasi, hingga pembiayaan dapat berjalan sesuai rencana sebelum keberangkatan menuju Jakarta yang dijadwalkan pada Agustus mendatang.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari, Amir Hasan, STP., SH., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan kontingen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan para peserta, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan.

"Jambore Nasional merupakan momentum penting bagi adik-adik Pramuka untuk mengembangkan karakter, menambah wawasan, dan membangun persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia," kata Amir Hasan dalam rapat tersebut.

Menurut dia, sinergi antara Kwartir, sekolah, dan orang tua menjadi fondasi utama dalam membentuk kontingen yang siap bersaing sekaligus membawa nama baik Kota Kendari di tingkat nasional.

Dalam forum tersebut, berbagai agenda strategis dibahas secara rinci. Mulai dari kesiapan peserta yang

telah lolos seleksi, kebutuhan perlengkapan lapangan, jadwal kegiatan, mekanisme keberangkatan, hingga pengelolaan anggaran yang akan digunakan selama mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional XII.

Amir Hasan juga mengingatkan para peserta untuk menjaga nilai-nilai dasar kepramukaan selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta semangat kebersamaan harus menjadi karakter yang melekat dalam diri setiap anggota kontingen.

"Kami berharap seluruh peserta dapat menjaga nama baik Kota Kendari dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat persaudaraan selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan andalan Kwartir Kota Kendari, kepala sekolah asal peserta, serta orang tua dan wali calon peserta kontingen. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menyamakan persepsi mengenai target dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Selain menjadi forum pembahasan teknis, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan dukungan moral maupun material kepada peserta yang akan mewakili daerah pada pertemuan Pramuka terbesar di Indonesia itu.

Secara historis, Jambore Nasional merupakan agenda lima tahunan Gerakan Pramuka Indonesia yang pertama kali digelar pada tahun 1973 di Situ Baru, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi wadah pendidikan nonformal bagi Pramuka Penggalang untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan melalui interaksi den-

gan peserta dari berbagai daerah.

Dalam perkembangannya, Jambore Nasional terus menjadi salah satu kegiatan strategis Gerakan Pramuka. Ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia berkumpul dalam satu perkemahan besar untuk mengikuti berbagai aktivitas pendidikan, budaya, teknologi, lingkungan hidup, hingga penguatan karakter kebangsaan.

Di tingkat internasional, konsep jambore sendiri berakar dari penyelenggaraan World Scout Jamboree yang pertama kali dilaksanakan di London, Inggris, pada tahun 1920. Kegiatan yang digagas pendiri gerakan kepanduan dunia, Robert Baden-Powell, itu menjadi simbol persaudaraan lintas negara yang hingga kini masih terus berlangsung dan diikuti puluhan ribu anggota kepanduan dari berbagai belahan dunia.

Amir Hasan menilai keikutsertaan kontingen Kendari dalam Jamnas XII tidak hanya menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman, tetapi juga sarana memperluas jejaring persahabatan dan memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia.

"Jambore Nasional bukan sekadar pertemuan Pramuka, tetapi juga ruang pembentukan karakter generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan," katanya.

Kwartir Kota Kendari optimistis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan dukungan penuh dari sekolah, orang tua, dan jajaran Gerakan Pramuka, kontingen Kota Kendari diharapkan mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama daerah pada Jambore Nasional XII Tahun 2026 di Jakarta. (\*)

## Bupati Buton Alvin Akawijaya Serap Aspirasi Warga Lasalimu di Tengah Efisiensi Anggaran



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra memanfaatkan momentum hari libur untuk melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu (14/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi terkait sektor pertanian, infrastruktur, air bersih, hingga jaringan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan mendasar warga.

Kunjungan kerja yang berlangsung dalam suasana santai itu menjadi sarana pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat di lapangan. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi warga disampaikan secara terbuka kepada kepala daerah beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut mendampingi.

Dalam pertemuan tersebut, isu ketersediaan air irigasi dan kondisi jalan usaha tani menjadi keluhan utama para petani. Mereka menilai dua aspek tersebut sangat menentukan produktivitas pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Lasalimu.

Selain persoalan pertanian, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jembatan penghubung antarwilayah yang dinilai memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi pertanian.

Keluhan mengenai layanan air bersih turut mengemuka dalam dialog tersebut. Masyarakat berharap

pemerintah daerah dapat mempercepat perbaikan jaringan distribusi air agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Buton menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Buton. Karena itu, setiap persoalan yang dihadapi petani harus kita dengarkan dan carikan solusi bersama," ujar Alvin Akawijaya Putra di hadapan warga Lasalimu.

Menurut Alvin, seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mengkomodasi kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas pembangunan.

Sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait air bersih, Bupati menginstruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk melakukan peninjauan langsung terhadap jaringan distribusi yang ada di wilayah Lasalimu.

"Saya minta PDAM turun langsung melihat kondisi jaringan air bersih dan segera mengambil langkah perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Alvin.

Tidak hanya itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat

daerah terkait, mulai dari OPD teknis, camat hingga kepala desa, untuk memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Koordinasi harus diperkuat agar penanganan setiap kendala di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran," tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Buton Daerah Pemilihan Kapon-tori-Lasalimu, Dr. La Subu, SH, MH, bersama sejumlah pimpinan OPD. Hadir pula Kepala Bappeda Manafu, Kepala Dinas Perikanan Rasmin Rahman, Kepala Dinas Pertanian Maâ€™mul Jamal, Kepala Dinas Sosial La Naji, Kepala Pelaksana BPBD Safaruddin, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam agenda yang sama, rombongan pemerintah daerah juga mengunjungi sentra pembuahan Nasi Bambu di Kelurahan Kamaru serta meninjau objek wisata Pantai Komerate. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi upaya melihat potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Maâ€™mul Jamal mengatakan dialog langsung dengan masyarakat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyelaraskan program pembangunan pertanian dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menurut dia, kelompok tani diharapkan menyusun proposal atau usulan resmi terkait kebutuhan pembangunan jalan usaha tani maupun sa-

rana pertanian lainnya agar dapat diverifikasi oleh tim teknis sebelum diusulkan dalam program pemerintah daerah.

"Segala macam persoalan pertanian dibuatkan usulan dan diketahui kepala desa atau kepala wilayah setempat sehingga dapat diverifikasi sesuai kebutuhan," kata Ma'mul.

Secara historis, sektor pertanian telah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian secara konsisten menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan seperti Kabupaten Buton.

Pada tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sejak lama menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk irigasi, jalan produksi, dan akses air bersih, sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Berbagai negara berkembang di Asia dan Afrika juga menerapkan pendekatan serupa dengan memperkuat konektivitas desa dan sistem pengairan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kunjungan kerja Bupati Buton ke Lasalimu menunjukkan pendekatan pembangunan yang berbasis dialog langsung dengan masyarakat. Melalui komunikasi dua arah tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan warga sekaligus memperkuat sektor pertanian, infrastruktur, dan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (\*)

## Kunjungi Buton Tengah, Pangdam Suntik Semangat Juang Prajurit Yonif TP 870



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pangdam XIV/ Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, menegaskan bahwa setiap satuan TNI dibentuk untuk meraih kemenangan melalui disiplin, latihan, dan semangat juang. Pene-gasan itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Batalyon Infanteri Tempur (Yonif TP) 870/Sangiawambulu di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Jumat (12/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam diterima oleh Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan bersama Komandan Yonif TP 870/Sangiawambulu, Letkol Inf. Andi Gumiliang. Ratusan prajurit menyambut kedatangan pimpinan Kodam XIV/Hasanuddin dengan barisan kehormatan dan semangat tinggi di Lapangan Lamedadi Tolandona.

Momentum itu dimanfaatkan Pangdam untuk memberikan arahan sekaligus motivasi kepada seluruh personel agar terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional melalui latihan yang berkelanjutan sebagai bekal menghadapi berbagai dinamika tugas di lapangan.

Dalam pesannya, Mayjen TNI Bangun Nawoko menekankan bahwa inti pengabdian seorang prajurit berada pada kemampuan tempur yang diasah secara konsisten. "Tugas prajurit sesungguhnya hanya dua: berlatih bertempur, berlatih bertempur. Itu saja sudah cukup bagi seorang prajurit," ujarnya.

Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para prajurit yang memperlihatkan dedikasi dan optimisme meski bertugas di satuan yang masih berkembang. "Saya

sangat berbesar hati, saya sangat bergembira dan saya sangat senang kalian mem-persembahkan ore-tan keringat, teriakan, dan saya melihat ges-tur-gestur semangat untuk menatap masa depan," katanya.

Menurut Pangdam, semangat yang ditunjukkan personel merupakan modal penting dalam membangun satuan yang profesional dan memiliki daya juang tinggi. Ia bahkan menyampaikan penghormatan kepada seluruh prajurit yang tetap mengabdikan penuh loyalitas di Yonif TP 870/Sangiawambulu.

Kutipan lain yang disampaikan Pangdam mendapat sambutan meriah dari peserta kegiatan. "Kepada kalian, saya hormat, saya bangga, saya setia. Ewakoo! Ewakoo!," serunya yang langsung dibalas pekikan penuh semangat dari para prajurit.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Yonif TP 870/Sangiawambulu Letkol Inf. Andi Gumiliang membacakan amanat Pangdam yang menekankan pentingnya mental juara bagi setiap personel. "Ingat, satuan hebat dilahirkan untuk menang, bukan menja-di pecundang, dan itu adalah kalian, Sangiawambulu muda," tegasnya.

Selain pengarahan kepada prajurit, rangkaian kunjungan juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon di lingkungan markas batalyon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung terciptanya kawasan militer yang hijau dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Kehadiran unsur pemerintah daerah

dalam penyambutan menunjukkan dukungan terhadap peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di wilayah.

Secara historis, tradisi kunjungan pimpinan TNI ke satuan-satuan di daerah telah lama menjadi bagian dari pembinaan personel dan organisasi. Melalui interaksi langsung di lapangan, pimpinan dapat memberikan motivasi, mengevaluasi kesiapan pasukan, serta memperkuat soliditas internal untuk menghadapi tantangan pertahanan negara yang terus berkembang.

Dalam konteks nasional, pembinaan kemampuan prajurit melalui latihan intensif merupakan salah satu pilar modernisasi TNI yang terus didorong sejak era reformasi, sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter.

Sementara itu, secara internasional, berbagai angkatan bersenjata di dunia juga menerapkan pola serupa dengan menempatkan latihan berkesinambungan, kepemimpinan di lapangan, dan pembinaan moral sebagai fondasi utama dalam membangun satuan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Melalui kunjungan kerja ini, Pangdam XIV/Hasanuddin berharap seluruh prajurit Yonif TP 870/Sangiawambulu terus menjaga disiplin, meningkatkan kemampuan tempur, mempererat kedekatan dengan masyarakat, serta menanamkan keyakinan bahwa satuan yang kuat lahir dari kerja keras, loyalitas, dan semangat untuk meraih kemenangan. (\*)

## Azhari Teken PKS, Jalur Afirmasi Kemenhub Dibuka, Putra-Putri Buteng Berpeluang Masuk Sekolah Kedinasan



**Peliput: Ardi**

BUTENG, BP-Bupati Buton Tengah Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI sebagai langkah strategis untuk membuka jalur afirmasi bagi putra-putri daerah menempuh pendidikan di sekolah kedinasan transportasi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Garuda Kampus Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Tabanan, Jumat (12/6/2026).

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dibangun sebelumnya dan melibatkan dua perguruan tinggi kedinasan unggulan di bawah Kementerian Perhubungan, yakni Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)-STTD Bekasi.

Dalam kegiatan itu, hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Direktur Poltrada Bali, Direktur PTDI-STTD Bekasi, Direktur Poltek Penerbangan Indonesia Curug, serta tujuh kepala daerah lainnya yang menjalin kerja sama serupa untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi.

Bupati Azhari menegaskan bahwa kerja

sama ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. "Kami telah berdiskusi intensif dengan Kepala BPSDM agar anak-anak Buteng dapat memperoleh kuota atau jalur afirmasi sehingga peluang diterimanya menjadi lebih besar," ujarnya.

Menurut Azhari, keberadaan jalur afirmasi diharapkan menjadi solusi bagi lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat di Buton Tengah yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai taruna sekolah kedinasan namun selama ini menghadapi persaingan seleksi yang sangat ketat.

Ia menambahkan, "Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing, baik untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi nasional maupun peluang kerja di tingkat internasional."

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah daerah berharap semakin banyak generasi muda Buton Tengah yang memperoleh pendidikan vokasi dan memiliki keterampilan profesional sesuai kebutuhan industri.

Secara historis, sekolah kedinasan di

bawah Kementerian Perhubungan telah menjadi salah satu jalur pencetak tenaga ahli transportasi Indonesia selama puluhan tahun. Lulusan lembaga tersebut berkiprah di berbagai bidang, mulai dari transportasi darat, laut, udara hingga perkeretaapian, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Di tingkat nasional, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai bagian dari agenda peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting agar pemerataan kesempatan pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Buton Tengah.

Secara internasional, pengembangan SDM transportasi juga menjadi perhatian banyak negara seiring meningkatnya konektivitas global dan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis serta sertifikasi sesuai standar keselamatan dan pelayanan. Berbagai lembaga pendidikan transportasi di dunia mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sektor tersebut.

Bupati Azhari berharap kesempatan yang terbuka melalui PKS ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelajar di Buton Tengah. "Kami ingin semakin banyak putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Buton Tengah melalui prestasi di sekolah kedinasan dan pengabdian di sektor transportasi," katanya.

Sementara itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran melalui laman resmi BPSDM Kementerian Perhubungan maupun berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah sebagai pintu layanan di daerah.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis jalur afirmasi akan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan kedinasan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas SDM lokal, tetapi juga melahirkan tenaga profesional yang mampu berkontribusi bagi pembangunan sektor transportasi Indonesia dan mendukung daya saing bangsa di tingkat global. (\*)

## Kemenkes Minta Sengketa RSUP Jayapura Diselesaikan Tanpa Mengganggu Pelayanan Pasien

**Peliput: Lisna**

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi pemalangan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas di atas segala bentuk kepentingan lainnya.

Di tengah berlangsungnya aksi tersebut, manajemen RSUP Jayapura memastikan seluruh layanan medis tetap beroperasi dengan melakukan pengalihan akses melalui pintu kedua. Langkah itu ditempuh agar pelayanan kepada pasien tidak terhenti meskipun pintu utama rumah sakit dipalang.

Berdasarkan laporan terbaru, Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan Rawat Jalan, dan Rawat Inap masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sebanyak dua pasien dirawat di IGD, 33 pasien menjalani perawatan inap, dan enam pasien berada di ruang perawatan intensif, sementara tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas sesuai jadwal.

Untuk menjaga stabilitas situasi, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta Rektorat Universitas Cenderawasih. Selain itu, manajemen telah mengeluarkan edaran kesiapsiagaan kepada seluruh pegawai dan terus memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat melalui media sosial resmi.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kese-

hatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan keprihatinannya atas aksi yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat memperoleh layanan kesehatan.

"Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat bergantung harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan," ujar dr. Azhar Jaya dalam siaran pers, Jumat (19/6).

Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan merupakan infrastruktur publik yang harus tetap dapat diakses kapan pun, terutama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan darurat.

"Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat," tegasnya.

Menurut Kementerian Kesehatan, penutupan akses menuju rumah sakit dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan pasien. Keterlambatan penanganan medis pada kondisi kegawatdaruratan berpotensi meningkatkan angka komplikasi hingga kematian yang sebenarnya dapat dicegah apabila akses pelayanan tetap terbuka.

"Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama," kata dr. Azhar Jaya.

Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan dalam pembangunan RSUP Jayapura. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tanpa mengorbankan kepentingan publik.

"Kami percaya,

dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti," pungkas dr. Azhar Jaya.

Secara historis, sengketa lahan yang berdampak pada fasilitas publik bukan merupakan fenomena baru di Indonesia. Dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur nasional selama dua dekade terakhir, pemerintah kerap mengedepankan pendekatan dialog, mediasi, dan penyelesaian berbasis hukum untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

Di tingkat internasional, berbagai organisasi kesehatan dunia juga menandatangani akses terhadap pelayanan medis sebagai kepentingan yang harus dilindungi dalam berbagai situasi. Prinsip menjaga operasional rumah sakit di tengah konflik sosial maupun bencana telah menjadi bagian dari praktik kemanusiaan global guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan.

Dengan kondisi yang masih berkembang di Jayapura, Kementerian Kesehatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Penyelesaian melalui komunikasi yang konstruktif diyakini menjadi jalan terbaik agar pelayanan kesehatan tetap berlangsung sekaligus membuka ruang penyelesaian sengketa secara adil dan damai. (\*)



**KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN**

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA  
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi  
Redpel: Prasetyo  
Korlip: Firman  
Redaktur: Kasrun, Rahim  
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn  
Pracetak: Aditya  
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA  
Komisaris: Erna Agule  
Direktur Utama: Andina Latief  
Manager Keuangan: Nabila DAA  
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin  
Kepala Sirkulasi: Robi  
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman  
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun  
Kepala Biro Buton: La Harman  
Kepala Biro Buton Selatan: Firman  
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin  
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin  
Agen Buton Selatan: Firman  
Agen Buton: Samrihan  
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com  
Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

## Kejagung Kembali Tambah Tersangka Kasus Korupsi MBG, Total Enam Orang Ditetapkan, Ketua Yayasan Ikut Jadi Tersangka Baru



Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi.

### Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Agung (Kejaksaan Agung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam perkara yang menyeret pengelolaan program periode 2025-2026 itu kini menjadi enam orang.

Penetapan tersangka terbaru dilakukan terhadap Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), yang diduga memiliki peran dalam pengaturan kerja sama mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional, yang semestinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah di seluruh Indonesia.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa GHS berperan sebagai pihak swasta yang diminta un-

tuk mencari mitra yayasan pelaksana SPPG.

“GHS memberikan sejumlah mata uang baik dalam bentuk asing maupun rupiah kepada saudara DH,” ujar Syarif Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut penyidik, pemberian tersebut berkaitan dengan proses penunjukan mitra dalam pelaksanaan program yang seharusnya berbasis transparansi dan seleksi ketat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, GHS langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka lain yang berasal dari unsur pejabat dan pihak swasta dalam kasus yang sama.

Kelima tersangka tersebut adalah eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, serta Asep Yusuf Somantri dan Andri Mulyono.

Selain itu, perusahaan PT Yasa Artha Trimanunggal

juga turut disebut dalam rangkaian pengadaan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG tersebut.

Dalam konstruksi perkara, program MBG semestinya dilaksanakan melalui yayasan SPPG yang terafiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran.

Namun, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses penunjukan mitra, termasuk keterlibatan yayasan yang diduga memiliki afiliasi dengan pihak internal penyelenggara program.

Kejaksanaan Agung juga mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah barang, mulai dari kendaraan listrik hingga perangkat elektronik yang digunakan dalam mendukung operasional program.

Barang yang diduga mengalami mark up tersebut meliputi 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Jika ditarik da-

lam konteks kebijakan publik, sejumlah program bantuan sosial di Indonesia sebelumnya juga kerap menghadapi persoalan serupa, seperti program beras miskin (Raskin) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang pernah disorot karena lemahnya pengawasan distribusi.

Secara internasional, kasus penyimpangan dana program makanan sekolah juga pernah terjadi di beberapa negara, seperti skandal pengadaan makan siang sekolah di Brasil serta dugaan fraud dalam National School Lunch Program di Amerika Serikat, yang menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan pangan publik.

Hingga kini, penyidik Kejagung masih mendalami aliran dana, mekanisme pengadaan, serta potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang seiring pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dan tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik. (\*)

## Kasus Ijazah Jokowi Memasuki Babak Baru, Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap



### Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- ” Penanganan kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memasuki babak baru setelah penyidik Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka, Roy Suryo Notodiprojo dan Tifa Fauzia Tyassuma atau dr Tifa, pada Jumat (19/6) pagi. Penangkapan dilakukan ketika berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Informasi penangkapan tersebut dibenarkan oleh tim kuasa hukum masing-masing tersangka. Roy Suryo dikabarkan ditangkap sekitar pukul 07.00 WIB, sementara dr Tifa dijemput aparat kepolisian di apartemennya sekitar pukul 06.47 WIB.

Penangkapan itu terjadi setelah proses penyidikan berlangsung selama beberapa bulan sejak keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025. Selama periode tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman berbagai keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, sebelumnya menyampaikan bahwa berkas perkara yang diajukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah dinyatakan lengkap.

“Alhamdulillah jaksampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi,” kata Iman saat memberikan keterangan

pada awal Juni lalu.

Dengan status P21 tersebut, perkara memasuki tahap berikutnya, yakni tahap II atau proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya diproses menuju persidangan.

Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yakup Hasibuan, sebelumnya telah memperkirakan bahwa proses hukum akan segera bergerak ke tahap II setelah berkas dinyatakan lengkap. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan terkait penahanan maupun langkah hukum lanjutan sepenuhnya berada di tangan penyidik.

“Kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap II atau penahanan. Itu sepenuhnya kewenangan penyidik,” ujar Yakup.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo menyangkan langkah penangkapan yang dilakukan penyidik. Menurut mereka, selama proses penyidikan berlangsung, kliennya bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan serta menjalani wajib lapor secara rutin.

“Klien kami selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik bahkan selalu melaksanakan wajib lapor,” kata Petrus Selestinus, salah satu anggota tim kuasa hukum Roy Suryo.

Petrus menilai apabila tujuan penyidik adalah melaksanakan proses tahap II, maka langkah tersebut dapat dilakukan melalui surat panggilan resmi tanpa harus menggunakan upaya paksa berupa penangkapan.

Senada dengan itu, kuasa hukum dr Tifa, Aziz Yanuar, membenarkan bahwa kliennya dijemput aparat kepolisian pada Jumat

pagi. Meski demikian, pihaknya belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan ditempuh setelah penangkapan tersebut.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa berawal dari tuduhan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang berkembang di ruang publik. Perkara itu kemudian bergulir ke ranah hukum setelah adanya laporan yang diproses oleh aparat penegak hukum hingga berujung pada penetapan tersangka.

Dalam sejarah hukum Indonesia, kasus yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang dianggap tidak benar, maupun sengketa mengenai dokumen pendidikan tokoh publik bukanlah hal baru. Namun, perkara yang menyeret nama mantan presiden dan sejumlah figur publik ini menjadi salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena melibatkan isu politik, hukum, dan kepercayaan publik secara bersamaan.

Secara internasional, sejumlah negara juga pernah menghadapi polemik terkait keaslian dokumen pendidikan pejabat publik. Di berbagai negara, kontroversi mengenai latar belakang akademik tokoh politik kerap memicu penyelidikan hukum maupun pemeriksaan administratif sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara.

Hingga kini, proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr Tifa masih terus berjalan. Status keduanya tetap sebagai tersangka, sementara penentuan bersalah atau tidak bersalah sepenuhnya akan ditentukan melalui mekanisme peradilan yang berkekuatan hukum tetap. (\*)

## Sambut 1 Muharram, Ribuan Warga Betoambari Semarakkan Pawai Obor Sekda Baubau La Ode Darussalam Beri Apresiasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Senin (15/6/2026) malam berlangsung semarak melalui pawai obor yang melibatkan masyarakat dari dua Kelurahan. Kegiatan bernuansa religius tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., yang menilai tradisi tersebut mampu memperkuat syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan warga.

Pawai obor diawali setelah masyarakat melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid masing-masing. Selanjutnya, peserta berkumpul di Kantor Kecamatan Betoambari sebelum bergerak mengelilingi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Lipu dan Kelurahan Katobengke dengan membawa obor sebagai simbol semangat menyambut tahun baru dalam kalender Hijriah.

Dalam kesempatan itu, La Ode Darus Salam menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kecamatan dan seluruh mas-

asyarakat yang berpartisipasi menjaga tradisi tersebut. Menurutnya, kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial.

"Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Betoambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah melaksanakan pawai obor. Tentu ini merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah," ujar La Ode Darus Salam.

Ia menilai antusiasme masyarakat pada peringatan 1 Muharram tahun ini sangat tinggi. Warga memilih berkumpul di rumah ibadah untuk melaksanakan salat berjamaah sebelum mengikuti kegiatan bersama di lingkungan kecamatan, sehingga nuansa religius terasa lebih kuat.

"Kalau selama ini Tahun Baru Masehi yang ramai, kali ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai. Mereka berkumpul ba'dah Isya setelah salat berjamaah, kemudian menuju kantor kecamatan dan berkeliling di lingkungan Lipu dan Katobengke. Luar biasa," katanya.

Sekda Baubau juga memanfaatkan mo-

mentum tersebut untuk menyampaikan harapan agar pergantian tahun Hijriah menjadi awal yang baik bagi seluruh masyarakat. Ia mendoakan agar warga senantiasa memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan dan dilimpahi rezeki.

"Mudah-mudahan pada tahun 1448 Hijriah ini kita semua diberikan rezeki dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala," ucapnya.

Meskipun pelaksanaan pawai obor tahun ini baru melibatkan dua Kelurahan, La Ode Darus Salam berharap kegiatan serupa dapat terus dipertahankan bahkan diperluas cakupannya pada masa mendatang agar semakin banyak masyarakat yang ikut merasakan semangat syiar Islam.

"Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin berkembang sehingga menjadi tradisi positif yang memperkuat kebersamaan masyarakat," ungkapnya.

Tradisi menyambut Tahun Baru Islam dengan pawai obor telah lama berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Selain menjadi bagian dari syiar keagamaan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai media

edukasi bagi generasi muda mengenai makna hijrah, persatuan, dan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang menjadi awal penanggalan Hijriah.

Secara historis, kalender Hijriah mulai diberlakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian digunakan secara luas oleh umat Islam di berbagai belahan dunia sebagai acuan penanggalan keagamaan. Di Indonesia, peringatan 1 Muharram setiap tahun kerap diisi dengan doa bersama, tabligh akbar, santunan sosial, hingga pawai obor yang menjadi simbol penerangan dan harapan memasuki tahun baru Islam.

Pelaksanaan pawai obor di Kecamatan Betoambari menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat berpadu dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan juga mencerminkan upaya menjaga harmoni sosial melalui kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan membangun solidaritas antarwarga. (\*)

## Tahun Baru Islam, Pemkot Baubau Ajak Warga Maknai Hijrah untuk Perkuat Pembangunan



Pewartar: Amat Jr

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat semangat perubahan, meningkatkan kualitas diri, serta memererat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan Tahun Baru Islam yang berlangsung di Masjid Raya Kota Baubau pada Senin (15/6/2026).

Ajakan itu disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si., yang hadir mewakili Wali Kota Baubau. Di hadapan para jamaah, ia menegaskan bahwa pergantian tahun Hijriah memiliki makna yang jauh lebih mendalam dibanding sekadar pergantian penanggalan.

Menurut Dahrul Dahlan, Tahun Baru Islam seharusnya menjadi ruang refleksi atau muhasabah bagi setiap individu maupun pemerintah untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui sekaligus menyusun langkah perbaikan di masa mendatang.

"Momentum ini adalah refleksi atau muhasabah atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu, sekaligus menjadi titik tolak untuk berbenah menjadi pribadi, masyarakat, dan pemerintah yang lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat hijrah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW mengandung pesan penting mengenai keberanian melakukan transformasi menuju kondisi

yang lebih baik. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek spiritual, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial, etos kerja, dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat.

"Hikmah terbesar hijrah adalah keberanian melakukan transformasi ke arah yang lebih positif di berbagai lini kehidupan," kata Dahrul Dahlan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Baubau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi melalui semangat kerja bersama. Nilai gotong royong dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus menjaga persatuan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Selain mengedepankan kolaborasi, Dahrul Dahlan menekankan pentingnya membangun budaya disiplin, kerja keras, kepedulian sosial, dan komitmen bersama sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari kita song-song tahun yang baru dengan optimisme, semangat baru, dan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan kota yang kita cintai ini," tuturnya.

Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Raya Kota Baubau berlangsung dalam suasana khidmat dan damai. Rangkaian kegiatan diisi dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk keselamatan, keberkahan, serta kemakmuran masyarakat Kota Baubau di tahun yang baru.

Secara historis, penanggalan Hijriah mulai digunakan pada

masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 638 Masehi. Kalender tersebut menetapkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sebagai titik awal perhitungan tahun Islam. Pemilihan peristiwa hijrah dimaksudkan untuk menandai lahirnya babak baru dalam perkembangan peradaban Islam yang menekankan persatuan, tata kelola masyarakat, dan keadilan.

Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam telah lama menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan budaya masyarakat. Berbagai daerah menyelenggarakan kegiatan seperti doa bersama, pengajian, pawai, hingga aksi sosial yang bertujuan memperkuat nilai kebersamaan dan mempererat hubungan antarsesama warga.

Secara internasional, momentum 1 Muharram juga diperingati oleh komunitas Muslim di berbagai negara dengan beragam tradisi sesuai budaya lokal masing-masing. Meski bentuk perayaannya berbeda, esensi yang diusung tetap sama, yakni introspeksi diri, memperbaiki akhlak, dan memperkuat solidaritas sosial sebagai bagian dari semangat hijrah.

Melalui peringatan tersebut, Pemerintah Kota Baubau berharap nilai-nilai agama tidak hanya menjadi pedoman ibadah personal, tetapi juga menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perubahan yang dibangun sejak awal tahun Hijriah diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (\*)